

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TARAKAN

JALAN HALMAHERA NO. 175, PAMUSIAN, TARAKAN TENGAH, KOTA TARAKAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan Tahun 2021 dengan sistematika yang ditentukan.

Kami harapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tarakan. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Tarakan, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Tarakan



Doni Prabudi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Tarakan dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada stakeholder melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Tarakan tahun 2021. Laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN, yaitu

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara adalah KPKNL Tarakan sebagai lembaga/institusi vertikal DJKN di daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di lingkup wilayah kerja Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara di wilayah Kota Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tarakan untuk

periode 2020 s.d. 2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Tarakan yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tarakan telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif.
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.
6. Edukasi yang efektif.
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
8. SDM yang kompeten.
9. Organisasi yang *fit-for-purpose*.
10. Pengelolaan keuangan yang optimal.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tarakan. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tarakan Tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan Kontrak Kinerja DJKN Tahun 2021 yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2021	Target Addendum 2021	Realisasi 2021 (Raw)	Realisasi 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	-	89,43%	89,43%
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp8.940.000.000	-	Rp12.653.982.723	141,54%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2021	Target Addendum 2021	Realisasi 2021 (Raw)	Realisasi 2021 (%)
	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	Rp1.000.000.000	-	Rp1.806.550.615	180,66%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	Rp79.000.000.000	Rp92.000.000.000	Rp163.246.548.158	177,44%
	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92	-	98,81	107,40%
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,45 (skala 5)	-	4,75 (skala 5)	106,74%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	178 bidang	-	178 bidang	100%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	27 NUP	-	27 NUP	100%
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	-	0,00%	0,00%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	11 BKPN	37 BKPN	41 BKPN	110,81%
	Persentase produktivitas lelang	35%	-	73 lelang laku (5 lelang sukarela)	52,31%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	-	135 lelang	100%
	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	12,50%	-	0,00%	0,00%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2021	Target Addendum 2021	Realisasi 2021 (Raw)	Realisasi 2021 (%)
Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91	-	93,86	103,14%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	-	17 persetujuan yang diterbitkan telah ditindaklanjuti	95,24%
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	-	120%	120%
Organisasi yang fit for purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	-	92,95	123,93%
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	-	95,25	119,06%
Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	-	94,14%	94,14%

Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2021, 1 (satu) IKU yang berwarna kuning yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Kesalahan SPM

Hal ini disebabkan karena perbedaan data supplier atas tagihan kontraktual yang telah direkam pada Aplikasi SAKTI satker dan telah didaftarkan ke KPPN dengan data SPAN KPPN;

b. Deviasi Halaman III DIPA

Hal ini dikarenakan selisih antara nilai kontrak pelaksanaan kontruksinya yang diproyeksikan dalam RPD Triwulan II dengan nilai penawaran/nilai kontrak yang disepakati, serta perbedaan tanggal SP2D SPM GUP;

c. Realisasi tidak maksimal

Realisasi anggaran sebesar 96,96% terdiri dari realisasi belanja barang sebesar 96,15% dan belanja modal sebesar 97,48%. Ketidakmaksimalan nilai Indikator Realisasi karena merupakan nilai average (rata-rata) atas capaian setiap triwulan. Pagu belanja modal Gedung/Bangunan sebesar 55,57% dari pagu DIPA dengan pembayaran yang dilakukan secara termin menjadi kendala utama percepatan penyerapan anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. PENJELASAN UMUM	2
1. Profil Kantor	2
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	4
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	5
C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) ORGANISASI	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan	8
B. Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan	11
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	22
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI	22
1. Membandingkan Antara Target Awal Tahun, Target Addendum, dan Realisasi Kinerja	22
2. Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Periode Sebelumnya ...	28
a. Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir	28
b. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah ...	30
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ...	32
4. Upaya <i>Extra Effort</i> yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja	35
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	39
7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko	39
8. Rencana Aksi ke Depan	40
B. REALISASI ANGGARAN	43
1. Pendapatan KPKNL TARAKAN	43
2. Belanja KPKNL TARAKAN	43
BAB IV PENUTUP	44
A. SIMPULAN	44
B. LANGKAH DI MASA MENDATANG	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Profil Kantor

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Halmahera No. 175, Pamusian Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Hingga 31 Desember 2021, wilayah kerja KPKNL Tarakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi:

1. Kota Tarakan;
2. Kabupaten Berau;
3. Kabupaten Bulungan;
4. Kabupaten Malinau;
5. Kabupaten Nunukan; dan
6. Kabupaten Tana Tidung.

Semua kabupaten/kota tersebut masuk ke wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara, kecuali Kabupaten Berau yang merupakan wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

KPKNL Tarakan dipimpin oleh Kepala Kantor Doni Prabudi, dibantu Kepala Subbagian Umum Nurtina Rahma Fahriza, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Bayu Saputra Surya Wardhana, Plt. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Nurtina Rahma Fahriza, Plt. Kepala Seksi Piutang Negara Melliana Andriani Susanto, Plt. Kepala Seksi Pelayanan Lelang Bayu Saputra Surya Wardhana, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Melliana Andriani Susanto, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Lapianus Bubu serta Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda Joko Hadi Sugondo, Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Arasmin Simamora, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama Yohanes Eko Dedi Kurniawan, Heni Rahayu Wulandari, dan Rini Rosfitasari. Keseluruhan staff pegawai KPKNL Tarakan adalah berjumlah 22 orang dan 10 orang tenaga honorer untuk mendukung pelayanan yang diberikan KPKNL Tarakan.

2. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

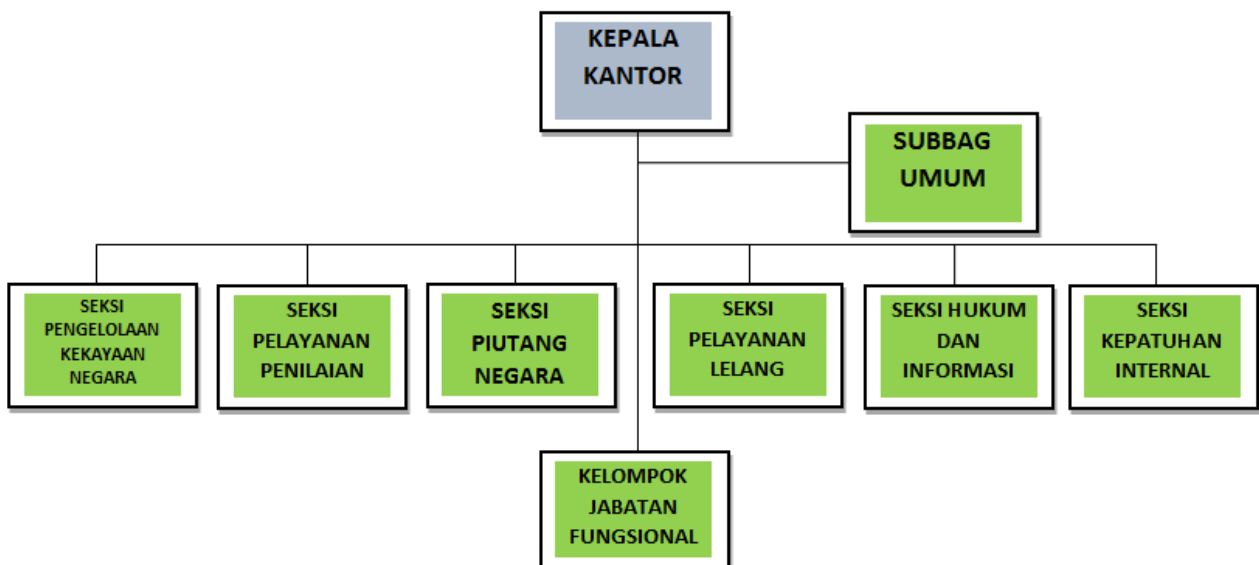
- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan Piutang Negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada KPKNL Tarakan pada tahun 2021 terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI KPKNL



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, didukung oleh sumber daya manusia yang ada di KPKNL Tarakan tahun 2021 berjumlah 22 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	1	4	5
3	III	5	11	16
4	IV	1	-	1
	Jumlah	7	15	22

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai PNS	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DI	DIII	DIV/S-1	S2	
1.	Eselon 2	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon 3	-	-	-	-	1	1
3.	Eselon 4	-	-	-	1	3	4
4.	Fungsional	-	-	-	5	-	5
5.	Pelaksana	-	1	4	7	-	12
	Jumlah	-	1	4	13	4	22

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

KPKNL Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang, KPKNL memiliki peran strategis berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Tarakan memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan Negara, pengamanan kekayaan Negara dan penatausahaan kekayaan Negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Tarakan mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Tarakan sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Tarakan dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain: Portofolio Aset, Sertifikasi BMN, serta persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara.

2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan Negara setelah dilakukan inventarisasi untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan Negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan Negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik Negara lainnya yang berada pada lingkungan Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian Kekayaan Negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/BMD. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 tanggal 21 September 2012 yang membatalkan frasa 'badan-badan negara' pada Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, maka piutang BUMN bukan lagi termasuk sebagai Piutang Negara. Kini fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara dari instansi pemerintah.

Sesuai dengan instruksi dari Kantor Pusat DJKN, pengurusan piutang dari bank BUMN telah dikembalikan kepada penyerah piutang dan segala tindakan hukum pengurusan piutang tersebut yang bersifat eksekusi dihentikan. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Tarakan meningkatkan upaya penggalian potensi piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan non eksekusi dan eksekusi terhadap suatu putusan/ penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi

sebagai *akta van transpor* untuk kepentingan peralihan hak. Lelang diharapkan menjadi paradigma yang meresap ke dalam "*mindset*" masyarakat, sehingga lelang dipandang sebagai sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Tarakan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara. Dari kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL menghasilkan PNBP aset dan manfaat sosial. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh PNBP berupa Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan juga Pegadaian. Seluruh PNBP yang dihasilkan disetorkan seluruhnya ke kas negara.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tarakan memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di tahun 2021, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Masih adanya BMN yang tidak sesuai dengan SBSK;
- Adanya bidang tanah yang tumpang tindih, masuk kawasan hutan, masuk HGU, dan sengketa lainnya;
- Adanya beberapa isian form indeks hasil pengukuran BPS yang sudah tidak relevan;

2. Pengurusan Piutang Negara

- Alamat debitur dan lokasi barang jaminan pada Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tidak lengkap;
- BKPN tidak dilengkapi Barang Jaminan;
- Proses Pengurusan tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19;

3. Layanan Lelang

- Daya beli masyarakat masih belum pulih akibat pandemi COVID-19;
- Untuk lelang hak tanggungan/sektor perbankan, frekuensi lelang rendah dikarenakan NPL bank di lingkup kerja KPKNL Tarakan rendah;

4. Pengelolaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

- Beberapa pelatihan yang frekuensinya terbatas dalam 1 tahun anggaran jadwalnya berbarengan dengan pelaksanaan tugas pegawai

b. Anggaran

- Indikator Kesalahan SPM, Halama III DIPA, dan Realisasi Anggaran tidak maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menjadi alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Tarakan merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. KPKNL Tarakan sebagai instansi vertikal DJKN di daerah berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Tarakan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Tarakan yang akan ditempuh adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- b. Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel;
- c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif adalah:

- a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN.
- b. Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN.
- c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
- d. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN.
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang Kekayaan Negara pada

satker-satker di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung serta penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder*.

- f. Optimalisasi BMN melalui reviu kinerja BMN, penggunaan bersama oleh beberapa satuan kerja.
- g. Mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan menggunakan indikator Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- h. Percepatan sertifikasi BMN:
 - Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP
 - Pembuatan Nota Kesepahaman antara Kanwil DJKN, Kanwil BPN dan satker-satker Kementerian/Lembaga terkait program sertifikasi BMN berupa tanah.
 - Pembentukan Tim Pokja Percepatan Sertifikasi BMN berupa tanah.
 - Peningkatan koordinasi antara Kanwil DJKN, Kanwil BPN, KPKNL, Kantor Pertanahan dan satker-satker Kementerian/Lembaga.

2. Pelayanan Lelang yang Modern dan Terpercaya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan lelang yang optimal.
- b. Terwujudnya PNPB dari pelayanan lelang yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung, antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi.

Untuk mendukung strategi tersebut, akan dilakukan:

- Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi lelang dengan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa.
 - Pembuatan *database* pelaksanaan lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan.
- b. Improvisasi dan inovasi sosialisasi lelang guna peningkatan pelayanan (modernisasi lelang melalui *e-auction*) dengan melakukan:
 - Integrasi seluruh proses pelaksanaan lelang menggunakan *e-auction*, mulai dari permohonan hingga pelaksanaan lelang.
 - Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi *e-auction* kepada stakeholder.
 - Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa lelang agar lebih berkualitas.

- c. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang. Hal ini dilakukan dengan jalan:
 - Pelaksanaan Focus Grup Discussion yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang dan juga sebagai sarana knowledge sharing bagi Pelelang.
 - Pelaksanaan Capacity Building bagi Pelelang pada KPKNL Tarakan dalam rangka penyamaan persepsi guna keseragaman dan tambahan pemahaman peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, kemampuan teknis, keterampilan dan memiliki kepribadian dan sikap integritas tinggi, objektif, teliti, jujur, dan bertanggung jawab sehingga dalam memberikan pelayanan lebih profesional.
3. Peningkatan Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain:

 - a. Melakukan kegiatan *knowledge sharing*, diskusi berkala, *in house training* di bidang penilaian.
 - b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan kaji ulang laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
 - c. Melakukan survei data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran yang ada di seluruh wilayah Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.
 - d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Tarakan yang *agile*, efektif, dan efisien.

Kondisi yang ingin dicapai untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik KPKNL Tarakan yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi-strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

 - a. Implementasi *Work From Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*.
 - b. Penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisasi

- dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.
- c. Penguatan budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).
 - d. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*.
 - e. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

B. Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan

Visi dan misi yang tertuang dalam restra KPKNL tarakan tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Tarakan sebagai berikut:

KONTRAK KINERJA NOMOR 9/KN.25/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan

saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92 (skala 100)
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45 (skala 5)
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	78%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	87,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91 (skala 100)
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75 (skala 100)
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			(skala 100)
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	190.011.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	7.200.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	11.672.000
3. Pengelolaan Aset	171.139.000
Dukungan Manajemen	4.890.642.000
1. Legislasi dan Litigasi	5.804.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.859.422.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	10.072.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15.344.000

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
	2b-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92	92	92	92	92	92	92
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien								
	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,45	4,45
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	91	-	91	91	91
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10 a- CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5 %	95,5%

Pada Tahun 2021, KPKNL Tarakan mengalami pergantian Kepala Kantor pada Triwulan III sehingga dengan adanya mutasi tersebut, terbentuk Kontrak Kinerja Kepala Kantor baru dengan 18 IKU dan perbedaan pada rincian target juga anggaran program/kegiatan sebagai berikut:

**KONTRAK KINERJA
NOMOR 9.1/KN.25/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

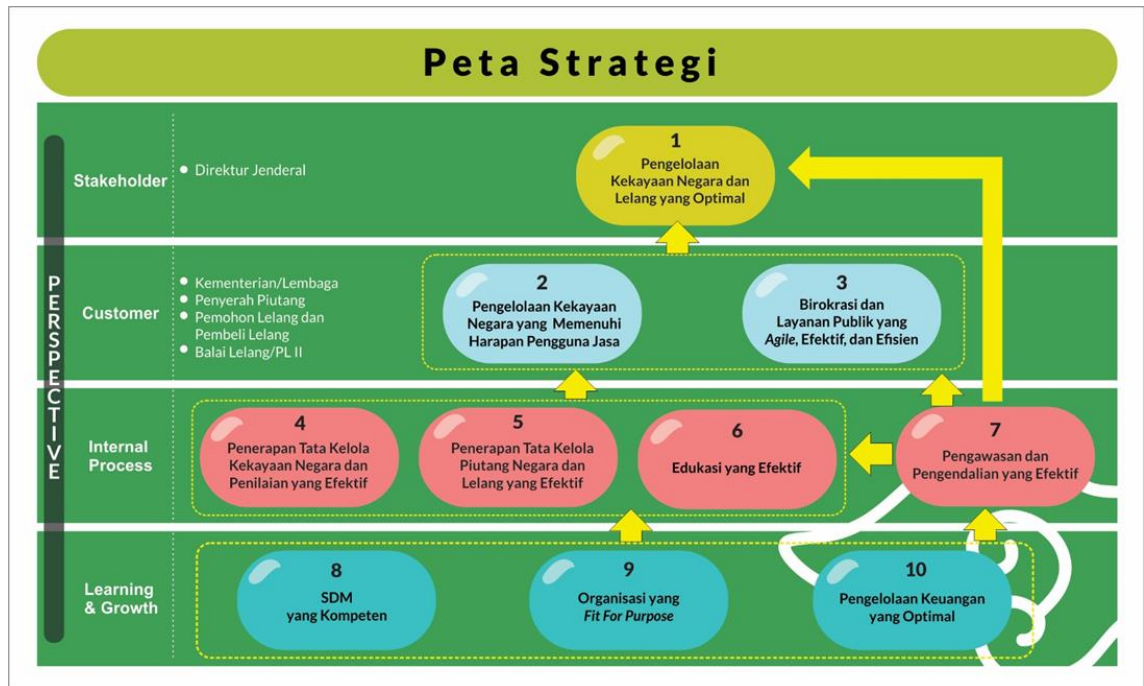
Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan

saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
 KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92 (skala 100)
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45 (skala 5)
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
	Negara dan Lelang yang Efektif	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91 (skala 100)
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75 (skala 100)
		9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80 (skala 100)
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	166.263.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6.200.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	6.015.000,00
3. Pengelolaan Aset	154.048.000,00
Dukungan Manajemen	4.164.269.000,00
1. Legislasi dan Litigasi	42.812.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.108.629.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	4.176.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	8.652.000,00

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	-	-	62%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	-	-	-	-	5%	5%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	-	-	-	-	2,93%	2,93%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	-	-	6,52%	6,52%
	2b-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	-	-	-	-	92	92
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien								
	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,45	4,45
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	-	-	-	-	2%	2%
	4b-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	-	-	-	-	-	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	5a-CP	Persentase Efektivitas	-	-	-	-	-	2,7%	2,7%

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	Penyelesaian BKPN							
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	35%	35%
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	-	-	92%	92%
	5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	-	-	-	-	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	91	91
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	-	-	-	-	16%	16%
8	SDM yang Kompeten							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	-	-	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	95,5%	95,5%

Pada Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2021 terdapat addendum atas target dan/atau *trajectory* pada IKU:

1. Raw Data Target Hasil Lelang (IKU Pokok Lelang) untuk Triwulan III; dan
2. Raw Data Target IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN untuk Triwulan III.

Kode IKU	Nama IKU	Target Semula	Target Ditetapkan
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Rp79.000.000.000	Rp92.000.000.000
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	11 BKPN	37 BKPN

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

1. Membandingkan Antara Target Awal Tahun, Target Addendum, dan Realisasi Kinerja

Perbandingan antara target awal tahun, target addendum, dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

K-WIDE	1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum		50%	50%	55%	55%	62%	62%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi		92,94%	92,94%	89,43%	89,43%	89,43%	89,43%	
Capaian Kontrak Awal		92,94%	92,94%	89,43%	89,43%	89,43%	89,43%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	8,73%	43,01%	43,01%	95,05%	95,05%	141,54%	141,54%	
Capaian Kontrak Awal	8,73%	43,01%	43,01%	95,05%	95,05%	141,54%	141,54%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	0,24%	96,44%	96,44%	97,07%	97,07%	180,66%	180,66%	
Capaian Kontrak Awal	0,24%	96,44%	96,44%	97,07%	97,07%	180,66%	180,66%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum	Adendum Raw Target							
Realisasi	25,92%	106,26%	106,26%	118,36%	118,36%	177,44%	177,44%	
Capaian Kontrak Awal	25,92%	106,26%	106,26%					
Capaian Kontrak Adendum	22,26%	91,24%	91,24%	118,36%	118,36%	177,44%	177,44%	

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	92	92	92	92	92	92	92	Maximize / Average
Target setelah Adendum								
Realisasi	99,00	99,73	99,37	97,88	98,87	98,63	98,81	
Capaian Kontrak Awal	99,00	99,73	99,37	97,88	98,87	98,63	98,81	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	-	-	-	-	4,45	4,45	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	-	-	-	-	-	4,75	4,75	
Capaian Kontrak Awal	-	-	-	-	-	4,75	4,75	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	-	87,64%	87,64%	97,75%	97,75%	100%	100%	
Capaian Kontrak Awal	-	87,64%	87,64%	97,75%	97,75%	100%	100%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	74,07%	74,07%	74,07%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kontrak Awal	74,07%	74,07%	74,07%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Minimize / Average
Target setelah Adendum								
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian Kontrak Awal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum	Adendum Raw Target							
Realisasi	18,18%	318,18%	318,18%	97,30%	97,30%	110,81%	110,81%	
Capaian Kontrak Awal	18,18%	318,18%	318,18%					
Capaian Kontrak Adendum	5,41%	94,59%	94,59%	97,30%	97,30%	110,81%	110,81%	

K-WIDE	5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	47,62%	51,85%	51,85%	50,54%	50,54%	52,31%	52,31%	
Capaian Kontrak Awal	47,62%	51,85%	51,85%	50,54%	50,54%	52,31%	52,31%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kontrak Awal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Minimize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian Kontrak Awal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	6. Edukasi yang Efektif							
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	91	91	-	91	91	91	Maximize / Average
Target setelah Adendum								
Realisasi	-	93,07	93,07	-	93,07	94,65	93,86	
Capaian Kontrak Awal	-	93,07	93,07	-	93,07	94,65	93,86	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	-	69,05%	69,05%	-	69,05%	95,24%	95,24%	
Capaian Kontrak Awal	-	69,05%	69,05%	-	69,05%	95,24%	95,24%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	8. SDM yang Kompeten							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	67,06%	94,12%	94,12%	116,25%	116,25%	120%	120%	
Capaian Kontrak Awal	67,06%	94,12%	94,12%	116,25%	116,25%	120%	120%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	9. Organisasi yang fit-for-purpose							
	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	-	-	-	-	75	75	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	-	-	-	-	-	92,95	93	
Capaian Kontrak Awal	-	-	-	-	-	123,93%	123,93%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	9. Organisasi yang fit-for-purpose							
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	80	80	80	80	80	80	80	Maximize / Average
Target setelah Adendum								
Realisasi	89,50	95,50	92,50	97,70	94,23	98,30	95,25	
Capaian Kontrak Awal	89,50	95,50	92,50	97,70	94,23	98,30	95,25	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	91,29%	91,88%	91,88%	95,23%	95,23%	94,14%	94,14%	
Capaian Kontrak Awal	91,29%	91,88%	91,88%	95,23%	95,23%	94,14%	94,14%	
Capaian Kontrak Adendum								

Pada Tahun 2021 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan mencapai 113,13% dan masuk kategori hijau (sangat baik) dengan perincian disampaikan sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket
	Stakeholder Perspective(25%)					30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120,00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	62%	89,43%	144,24 6%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	141,54%	141,54 3%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	181%	180,66 %	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)					16,59%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					114,46%	
2b-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	92,00	98,81	107,40 %	107,40%	hijau
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	177,44%	177,44 %	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					106,74%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,45	4,75	106,74 %	106,74%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)					32,73%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					106,36%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,00%	200,00 %	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					114,88%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP	P/M	100%	110,81%	110,81 %	110,81%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	52,31%	149,45 %	120,00%	hijau

Kode	IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	100,00%	108,70 %	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	200,00 %	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif					103,14%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	91	93,86	103,14 %	103,14%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif					112,04%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	95,24%	112,04 %	112,04%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)					33,81%	
8	SDM yang kompeten					120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00 %	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose					119,53%	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75%	92,95	12393,33%	120,00%	hijau
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	95,25	119,06 %	119,06%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					98,58%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	94,14%	98,58%	98,58%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						113,13%	hijau

2. Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Periode Sebelumnya

a. Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir

Meskipun terdapat IKU yang sama di setiap tahunnya, namun secara target, perhitungan, sasaran strategis, dan perspektif dapat berbeda untuk IKU yang sama. Namun apabila dibandingkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan, pada tahun 2017 diperoleh NKO sebesar 112,15%, tahun 2018 sebesar 113,03%, tahun 2019 sebesar 112,40%, tahun 2020 sebesar 107,77%, dan tahun 2021 sebesar 113,13%, dapat disampaikan tabel perbandingan (dalam persentase pencapaian target) sebagai berikut:

IKU	Pencapaian Target										Keterangan
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max	
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	144,25%	120,00%	Terdapat perbedaan target dan perhitungan antara tahun 2020 dengan tahun 2021
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	348,45%	120,00%	140,25%	120,00%	1660,89%	120,00%	101,63%	101,63%	141,54%	120,00%	Terdapat perbedaan target dan perhitungan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 - 2021
Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	-	-	-	-	-	-	124,53%	120,00%	180,66%	120,00%	Nilai Outstanding PN tahun 2020 adalah berkas (saldo PNDS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sedangkan nilai Outstanding PN tahun 2021 adalah berkas (saldo PNDS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	-	118,59%	118,59%	116,02%	116,02%	109,62%	109,62%	107,40%	107,40%	
Persentase realisasi pokok lelang	154,21%	120,00%	58,15%	58,15%	111,34%	111,34%	88,99%	88,99%	177,44%	120,00%	Terdapat perbedaan target raw yang cukup besar antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dan tahun 2021
Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	107,35%	107,35%	112,79%	112,79%	109,15%	109,15%	111,36%	111,36%	106,74%	106,74%	
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	-	-	140,00%	120,00%	104,65%	104,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan capaian atau realisasi terjadi pada raw data (jumlah bidang tanah)
Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	-	-	-	-	-	-	199,73%	120,00%	200,00%	120,00%	
Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	-	-	-	-	-	157,14%	120,00%	110,81%	110,81%	Peningkatan capaian atau realisasi terjadi pada raw data (jumlah BKPN)
Persentase produktivitas lelang	-	-	148,15%	120,00%	116,57%	116,57%	171,76%	120,00%	149,45%	120,00%	1. Terdapat perbedaan target dan perhitungan. 2. Terdapat pelaksanaan kedai lelang UMKM pada tahun 2021 sehingga frekuensi lelang sukarela tahun 2021 lebih banyak dari tahun 2020 dan mempengaruhi persentase capaian.
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	116,67%	116,67%	100,73%	100,73%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	108,70%	108,70%	
Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00%	120,00%	
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	106,86%	106,86%	109,90%	109,90%	-	-	104,39%	104,39%	103,14%	103,14%	
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	-	-	-	100,00%	100,00%	113,64%	113,64%	112,04%	112,04%	Terdapat perbedaan target dan perhitungan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 - 2021
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	109,72%	109,72%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Nilai hasil review pengelolaan kinerja	-	-	120,00%	120,00%	109,58%	109,58%	106,46%	106,46%	123,93%	120,00%	Penilaian hasil review pengelolaan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 sudah berbasis BSC
Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	-	-	-	-	-	119,06%	119,06%	
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	107,42%	107,42%	103,25%	103,25%	100,66%	100,66%	101,07%	101,07%	98,58%	98,58%	

b. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Apabila dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) maka dapat disampaikan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam RPJM (2020-2024)
		2019	2020	2021	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara					
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	100%	89,43%	57%
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	327.861 Miliar	9.640 Miliar	12.653 Miliar	100%
	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	-	63 Juta (6,23%)	1.806 Miliar (180,66%)	Tidak ada target dalam RPJM
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	45 (104,65%)	131 (100%)	178 (100%)	100%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	-	92 (100%)	27 (100%)	Tidak ada target dalam RPJM
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	-	0,08%	0,00%	29%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	11 BKPN (157,14%)	41 BKPN (110,81%)	100%
	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	0%	Tidak ada target dalam RPJM

Peningkatan Pelayanan Lelang					
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	73.741 Miliar (111,34%)	70.592 Miliar (88,99%)	163.246 Miliar (177,44%)	100%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase produktivitas lelang	47 Lelang Laku dari 126 Lelang (37,30%)	73 Lelang Laku dari 125 Lelang (58,40%)	73 Lelang Laku dari 135 Lelang (52,31%)	34%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	100%	100%	Tidak ada target dalam RPJM
Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan					
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	98,62	98,66	98,81	Tidak ada target dalam RPJM
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,77 (skala 5)	4,9 (skala 5)	4,75 (skala 5)	4,05 (skala 5)
Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91,92	93,96	93,86	Tidak ada target dalam RPJM
Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan					
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100%	90,91%	95,24%	75%
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	95,46%	120%	120%	Tidak ada target dalam RPJM
Organisasi yang fit for purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	93,14	74,52	92,95	Tidak ada target dalam RPJM
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	95,25	Tidak ada target dalam RPJM
Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,62%	96,02%	94,14%	95%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan KPKNL Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak terlepas dari strategi maupun langkah langkah yang telah direncanakan oleh masing-masing seksi. Selain itu tidak selamanya strategi yang telah di laksanakan berjalan sesuai rencana. Berikut analisis keberhasilan maupun alternatif solusi yang telah dilakukan KPKNL Tarakan:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			
Kode	IKU	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	- Koordinasi yang baik antara KPKNL Tarakan dengan Satuan Kerja, Kanwil DJKN Kaltimara dan Direktorat BMN	- Melakukan optimalisasi untuk BMN yang luasnya melebihi SBSK
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)	- Koordinasi yang baik antara KPKNL Tarakan, DJPB dan Satuan Kerja terkait	- Melakukan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	- Pengembalian BPKN ke BPJS Cabang Tarakan dan BPJS Cabang Berau; Koordinasi yang baik dengan Kanwil dan Penyerah Piutang;	- Koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara untuk peningkatan tahapan pengurusan PN berupa penyerahan surat paksa
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	- Realisasi pokok lelang berhasil mencapai target pada tahun 2021 yang lalu, karena didukung adanya lelang terutama pegadaian yang melebihi target	- Mengintensifkan komunikasi dengan pihak perbankan
2b-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	- Koordinasi yang baik antara KPKNL Tarakan dengan Satuan Kerja pemohon - Pemohon lelang telah memahami ketentuan/syarat dalam mengajukan lelang - Keberhasilan: Koordinasi yang baik antara KPKNL Tarakan dengan pihak bank BRI dan seksi PN	- Mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen serta mendorong satuan kerja untuk segera melengkapi kekurangan dokumen tersebut - Menghubungi pemohon lelang supaya melengkapi berkas permohonan, baik via surat maupun telepon

Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara KPKNL Tarakan dengan Satuan Kerja pemohon - Koordinasi yang baik antara KPKNL dengan Penyerah Piutang Negara - Koordinasi yang baik dengan pengguna jasa penilaian 	-
Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			
4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan	- Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL Tarakan, Kantor Pertanahan, Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait	- Melakukan verifikasi dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan terkait status tanah yang akan disertipikatkan
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	- Adanya koordinasi yang baik antara pihak KPKNL Tarakan, BPS dan Satuan Kerja terkait	- Melakukan koordinasi dengan BPS setempat
4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	- Adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan antara Seksi Penilaian dan Seksi PKN	- Koordinasi dengan Pengelola Barang (Seksi PKN)
Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian BKPN ke BPJS Cabang Tarakan dan BPJS Cabang Berau; - Koordinasi yang baik dengan Kanwil dan Penyerah Piutang; 	- Koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara untuk peningkatan tahapan pengurusan PN berupa penyerahan surat paksa
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	- Persentase produktivitas lelang telah mencapai target dikarenakan banyaknya satker maupun UMKM yang mengajukan lelang .	- Mengintensifkan komunikasi dengan pihak perbankan dan stake holder yang lain
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	- Lelang e-auction telah dikenal luas (memasyarakat) sehingga lebih mudah menjelaskan kepada pemohon lelang terkait sisi positif e-auction	-
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi data PNBPF - Rekonsiliasi data PNBPF antara OMSPAN dengan FocusPN

Sasaran Strategis 6: Edukasi yang Efektif			
6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara KPKNL dengan Penyerah Piutang Negara - Koordinasi yang baik antara KPKNL dengan Satuan Kerja - Koordinasi yang baik antara KPKNL dengan Pemohon Lelang 	-
Sasaran Starategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			
7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara KPKNL dengan Satuan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan
Sasaran Strategis 8: SDM yang Kompeten			
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Semua pegawai mendapat pemanggilan pelatihan dan dapat mengikuti sebagian besar pelatihan yang telah dijadwalkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan penggantian jadwal dan peserta pelatihan bagi pegawai yang berhalangan mengikuti pelatihan
Sasaran Strategis 9: Organisasi yang fit-for-purpose			
9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi update perangkat pengelolaan kinerja
9b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan seluruh pegawai khususnya Subbagian Umum - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal			
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan SPM disebabkan karena perbedaan data supplier atas tagihan kontraktual yang telah direkam pada Aplikasi SAKTI satker dan telah didaftarkan ke KPPN dengan data pada SPAN KPPN 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran - Membuat dan melakukan monitoring proyeksi capaian IKU

		<ul style="list-style-type: none"> - Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan selisih antara nilai kontrak pelaksanaan konstruksi yang diproyeksikan dalam RPD Triwulan II dengan nilai penawaran/nilai kontrak yang disepakati, serta perbedaan tanggal SP2D SPM GUP - Realisasi anggaran sebesar 96,96% terdiri dari realisasi belanja barang sebesar 96,15% dan belanja modal sebesar 97,48%. Ketidakmaksimalan nilai Indikator Realisasi karena merupakan nilai average (rata-rata) atas capaian setiap triwulan. Pagu belanja modal Gedung/Bangunan sebesar 55,57% dari pagu DIPA dengan pembayaran yang dilakukan secara termin menjadi kendala utama percepatan penyerapan anggaran 	
--	--	--	--

4. Upaya *Extra Effort* yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tarakan melakukan beberapa upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2021, yaitu:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		
Kode	IKU	Upaya <i>Extra Effort</i> yang Dilakukan
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	- Melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian luas BMN
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan DJPB untuk melakukan rekonsiliasi PNBP serta mendorong Satuan Kerja untuk melakukan tindak lanjut atas persetujuan BMN yang telah diterbitkan - Melakukan penggalan potensi lelang, terutama lelang sukarela - Penagihan Piutang Negara, Lelang barang jaminan

1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian BKPN BPJS - Kolaborasi dengan Kanwil dan Penyerah Piutang dalam program percepatan penyelesaian pengurusan PN penyerahan KLHK - Melaksanakan program Keringanan Utang 2021
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan upaya penggalian potensi lelang ke stakeholder - Upload obyek lelang pada media sosial KPKNL maupun aplikasi google my bussiness
2b-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dan tindak lanjut permohonan pengelolaan aset secara tepat waktu - Melakukan verifikasi permohonan lelang tepat waktu - Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP - Permintaan verifikasi piutang negara ke seksi PN apabila terdapat angsuran/pelunasan piutang
Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien		
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Satuan Kerja - Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP, membuka ruang konsultasi Pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara - Melakukan Pelayanan Lelang sesuai dengan SOP, berkoordinasi dengan satuan kerja - Melakukan Penilaian sesuai dengan SOP dan Berkoordinasi dengan Satker Pengguna Jasa mengenai jadwal pelaksanaan survei lapangan
Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif		
4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait bidang tanah yang akan disertifikatkan
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan untuk menilai kinerja BMN
4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi terkait data persetujuan pemindahtanganan maupun pemanfaatan BMN dengan Seksi PKN
Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian BKPN BPJS; - Kolaborasi dengan Kanwil dan Penyerah Piutang dalam program percepatan penyelesaian pengurusan PN penyerahan KLHK; - Melaksanakan program Keringanan Utang 2021
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan seksi PKN maupun Penilaian untuk mencari satker yang potensial mengajukan lelang, tapi belum mengajukan permohonan ke KPKNL

		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pihak perbankan, dalam rangka meningkatkan frekuensi lelang hak tanggungan - Melaksanakan lelang UMKM
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan kepada pemohon lelang terkait sisi positif e-auction, baik sewaktu pemohon lelang datang ke KPKNL maupun dengan sosialisasi ke tempat satker/pemohon lelang
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi data PNBPF - Rekonsiliasi data PNBPF antara OMSPAN dengan FocusPN
Sasaran Strategis 6: Edukasi yang Efektif		
6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terutama Pemerintah Kota/Daerah - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Satuan Kerja
Sasaran Starategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Satuan Kerja terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN
Sasaran Strategis 8: SDM yang Kompeten		
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Memetakan kompetensi pegawai dan merekomendasikan pegawai agar mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tusi dan minat masing-masing pegawai
Sasaran Strategis 9: Organisasi yang fit-for-purpose		
9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai terkait proses pengelolaan kinerja
9b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan FGD Pejabat Administrator - Melakukan koordinasi dengan PIC dan pejabat terkait dalam pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal		
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan optimalisasi anggaran - Melakukan penyesuaian RPD - Melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran - Menyediakan alat bantu monitoring pelaksanaan anggaran yang up to date bagi seluruh pejabat pengelola keuangan dan para pemegang peran manajerial

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Efisiensi terdiri atas efisiensi output program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I dan efisiensi RO untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi output program dan efisiensi RO antara lain capaian output program, capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir, dan realisasi anggaran.

Data efisiensi pada KPKNL Tarakan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Output	Target	Satuan	Capaian	CRO	(CRO x Pagu) - Realisasi
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	2	Kegiatan	2	1,00	0
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	4	Kegiatan	6	1,50	849.500
3	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Manajemen Risiko, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Bidang Kekayaan Negara dan Lelang	1	Rekomendasi	1	1,00	660.000
4	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	45	Surat Persetujuan/Penolakan	137	3,04	14.715.700
5	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	6	Risalah Lelang	41	6,83	12.658.000
6	Risalah Lelang	85	BKPN	135	1,59	5.857.900
7	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	178	Rekomendasi	178	1,00	1.540.000
8	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Brang dan Standar Kebutuhan (SBKSK)	64	Rekomendasi	107	1,67	4.809.000
9	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	Rekomendasi	1	1,00	94.000
10	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	Rekomendasi	1	1,00	5.228.000
11	Advokasi Hukum	2	Perkara	2	1,00	2.423.000
12	Operasionalisasi Kantor	12	Bulan Layanan	12	1,00	26.977.010
13	Kerumahtanggaan	12	Bulan Layanan	12	1,00	9.688.300
14	Pemeliharaan Peralatan Mesin	124	Unit	124	1,00	3.459.200
15	Peralatan Fasilitas Perkantoran	45	Unit	45	1,00	1.017.000
16	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4	Unit	4	1,00	109.400
17	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4783	M2	4783	1,00	655.500
18	Gedung/Bangunan	960	M2	960	1,00	65.762.000
19	Publikasi	4	Kegiatan	12	3,00	2.538.200
20	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Rekomendasi	5	1,00	1.207.000
CRO					131,76%	160.248.710
Efisiensi						3,70%

Dengan menggunakan metode perhitungan sesuai sesuai PMK 22/PMK.02/2021 dan ND-6/MK.1/2021 diperoleh nilai efisiensi KPKNL Tarakan sebesar 3,70%. Sebagaimana data pada tabel di atas, efisiensi pada KPKNL Tarakan diperoleh dari efisiensi penggunaan anggaran dan/atau optimalisasi capaian output yang melebihi target yang ditetapkan dalam DIPA terutama pada beberapa output non generik.

Selama masa pandemi Covid-19, KPKNL Tarakan mengoptimalkan media daring dan non tatap muka lainnya dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Hal ini

menekan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian output pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mendorong timbulnya efisiensi pelaksanaan anggaran.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

KPKNL Tarakan memiliki beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021 untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Inovasi tersebut sebagai berikut:

a. SiBela 2018 (Sistem Informasi Bendahara Pengeluaran)

SiBela dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas dan fungsi Bendahara pengeluaran, KPA. Staf PPK, PPK, Kasubbag Umum, dan Pejabat Pengadaan dengan menyediakan informasi yang up to date dan terpadu.

b. Kartu Monitor *Online* (TUTOR *Online*)

Sistem berbasis web based yang digunakan oleh Penyerah Piutang untuk mengetahui Tingkat Pengurusan dan Saldo Hutang.

c. LACI (Layanan Cepat dan Interatif)

Solusi edukasi yang efektif dan modern, untuk menjawab pertanyaan dasar yang sering kali ditanyakan oleh satuan kerja wilayah KPKNL Tarakan.

d. SnR (Schedule and Reminder)

Layanan Agenda dan Pengingat Jadwal Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang.

e. Ultra QR untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi layanan yang disediakan oleh KPKNL Tarakan dengan memanfaatkan teknologi digital.

f. OPS (Optimalisasi Pengembangan SDM)

Inovasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai, antara lain:

- Senin Terkini
- Rabu Berilmu
- Jum'at Sehat – Bersih - Rohani

g. ULTRA Gardenia Cafe (*Gardenia Island* dan *Ultra Café*)

Cafe dan taman yang dibentuk sedemikian rupa dengan suasana yang kekinian.

h. Hi, U!

Sebuah database permohonan layanan atas tusi Subbagian Umum yang progresnya dapat dipantu secara langsung oleh pemohon layanan.

7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko

Risiko yang akan dimitigasi besera tindak lanjut penanganannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk risiko satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait progress tindak lanjut pengelolaan aset pada bulan Oktober. Koordinasi yang

- dilakukan dibuktikan dengan output undangan pelaksanaan koordinasi tindak lanjut pengelolaan aset dan surat tugas koordinasi atas pengelolaan BMN. Setelah dilakukan koordinasi, satuan kerja telah melakukan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset berupa pemanfaatan sewa maupun pemindahtanganan BMN melalui penjualan (lelang).
- b. Untuk risiko pengadaan BMN tanah bangunan yang melebihi kebutuhan, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah melakukan koordinasi secara daring dan tatap muka dengan satuan kerja secara berkala. Koordinasi dan pengukuran terkait SBSK telah dilaksanakan pada beberapa satuan kerja di wilayah kerja Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Berau dengan output koordinasi dengan Surat Tugas koordinasi pengukuran SBSK. Dari hasil koordinasi tersebut diperoleh pengukuran penggunaan BMN yang telah sesuai dengan SBSK.
 - c. Untuk risiko objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang, Seksi Pelayanan Lelang telah melakukan koordinasi dengan pemohon dan mencantumkan dalam penetapan jadwal lelang agar pemohon dapat mengosongkan objek lelang pada *output* surat penetapan jadwal lelang. Dengan adanya surat penetapan jadwal lelang, maka objek lelang dapat dikosongkan oleh pemohon lelang agar dapat dikuasai oleh pembeli lelang
 - d. Untuk risiko banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih, yang disebabkan oleh alamat debitur tidak lengkap, tidak ada kontak person debitur, tidak dilengkapi dengan barang jaminan, dan barang jaminan tidak marketable. Seksi Pelayanan Piutang Negara telah melakukan penagihan debitur, penyampaian surat paksa, penelitian lapangan, koordinasi dengan Penyerah Piutang, dan lelang barang jaminan dengan output bukti koordinasi melalui whatsapp dengan satuan kerja, berita acara dan laporan penyitaan barang, SPPNL, surat rencana penyampaian surat paksa, laporan penelitian lapangan, dan PSBDT.

8. Rencana Aksi ke Depan

Rencana aksi KPKNL Tarakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		
Kode	IKU	Rencana Aksi ke Depan
1a-CP	Tingkat Kesesuai Penggunaan BMN dengan SBSK	- Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait pengukuran SBSK, perencanaan dan optimalisasi BMN
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)	- Melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan DJPB, melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja terkait, serta melakukan penggalan potensi PNBP

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang - Koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara untuk peninjauan lokasi barang jaminan
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara untuk peninjauan lokasi barang jaminan
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintensifkan komunikasi dengan sektor perbankan dan stake holder yang lain - Upload ke medsos KPKNL setiap mengadakan lelang
2b-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait pengelolaan BMN - Melengkapi/menambah formulir pengajuan yang bisa didownload secara online di aplikasi google my business - Mengadakan sosialisasi terkait permohonan lelang - Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP - Seluruh debitur yang mengangsur/melunasi piutang negara telah menggunakan Virtual Account
Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien		
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi berkelanjutan serta pembinaan terkait pengelolaan BMN - Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP, membuka ruang konsultasi Pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara - Melakukan Pelayanan Lelang sesuai dengan SOP, berkoordinasi dengan satuan kerja - Melakukan Penilaian sesuai dengan SOP dan Berkoordinasi dengan Satker Pengguna Jasa mengenai jadwal pelaksanaan survei lapangan
Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif		
4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait bidang tanah yang akan disertipikatkan
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan untuk menilai kinerja BMN
4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi terkait data persetujuan pemindahtanganan maupun pemanfaatan BMN dengan Seksi PKN
Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		

5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	- Koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara untuk peninjauan lokasi barang jaminan, memberikan informasi Crash Program
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	- Mengintensifkan komunikasi dengan sektor perbankan dan stakeholder yang lain
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	- Rekonsiliasi data PNBPN - Rekonsiliasi data PNBPN antara OMSPAN dengan FocusPN
Sasaran Strategis 6: Edukasi yang Efektif		
6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	- Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara berkelanjutan - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara - Melakukan koordinasi berkelanjutan serta pembinaan terkait pengelolaan BMN
Sasaran Starategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	- Melakukan koordinasi berkelanjutan serta pembinaan terkait pengelolaan BMN
Sasaran Strategis 8: SDM yang Kompeten		
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	- Melaksanakan pemetaan kompetensi pegawai dan mengusulkan pegawai mengikuti pelatihan
Sasaran Strategis 9: Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>		
9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pegawai dalam kegiatan pengelolaan kinerja
9b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	- Meningkatkan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan FGD Pejabat Administrator - Melaksanakan FGD Pejabat Administrator sesuai jadwal - Mengagendakan pelaksanaan FGD Pejabat Administrator sesuai jadwal yang ditetapkan
Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal		
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	- Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi - Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran - Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program tahun 2021, dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran KPKNL Tarakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan KPKNL TARAkan

No.	Uraian	2021		
		Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.940.000.000	12.653.982.723	141,54%

2. Belanja KPKNL TARAkan

No.	Uraian	2021		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	-	-	0,00%
2	Belanja Barang	1,678,185,000	1,613,509,490	96,15%
3	Belanja Modal	2,652,347,000	2,585,458,600	97,48%
	Jumlah belanja	4.330.532.000	4.198.968.090	96,815%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan pada BAB III bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja KPKNL Tarakan secara umum pada Tahun Anggaran 2021 adalah sangat baik. Semua target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan sangat baik, kecuali IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021 tercapai sebesar 113,13%.

B. LANGKAH DI MASA MENDATANG

Capaian kinerja dan prestasi KPKNL Tarakan yang sangat memuaskan harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. KPKNL Tarakan senantiasa akan meningkatkan kinerja di tahun 2021 dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara
 - Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait pengukuran SBSK, perencanaan dan optimalisasi BMN
 - Melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan DJPB, melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja terkait, serta melakukan penggalian potensi PNBPNBP
 - Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kantor Pertanahan, Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait
 - Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat BMN, Kanwil DJKN Kaltimara, BPS setempat dan Satuan Kerja terkait
 - Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait pengelolaan BMN
 - Melakukan koordinasi berkelanjutan serta pembinaan terkait pengelolaan BMN
2. Pengurusan Piutang Negara
 - Koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara untuk peninjauan lokasi barang jaminan
 - Memberikan informasi Crash Program kepada debitur
 - Rekonsiliasi data PNBPNBP antara OMSPAN dengan FocusPN
 - Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP
 - Membuka ruang konsultasi Pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara
 - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara

3. Layanan Lelang

- Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang
- Rekonsiliasi data PNBP
- Mengintensifkan komunikasi dengan sektor perbankan dan stake holder yang lain
- Upload ke medsos KPKNL setiap mengadakan lelang
- Melengkapi/menambah formulir pengajuan yang bisa didownload secara online di aplikasi google my bussiness
- Mengadakan sosialisasi terkait permohonan lelang
- Melakukan Pelayanan Lelang sesuai dengan SOP, berkoordinasi dengan satuan kerja
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara berkelanjutan

4. Layanan Penilaian

- Terus melakukan koordinasi kepada Seksi PKN mengenai data persetujuan pindahtanganan maupun pemanfaatan BMN
- Melakukan Penilaian sesuai dengan SOP dan Berkoordinasi dengan Satker Pengguna Jasa mengenai jadwal pelaksanaan survei lapangan

5. Pengelolaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

- Melaksanakan pemetaan kompetensi pegawai dan mengusulkan pegawai mengikuti pelatihan
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pegawai dalam kegiatan pengelolaan kinerja
- Meningkatkan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
- Melaksanakan FGD Pejabat Administrator sesuai jadwal
- Mengagendakan pelaksanaan FGD Pejabat Administrator sesuai jadwal yang ditetapkan

b. Anggaran

- Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran
- Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output